

TAJUK RENCANA

Keteladanan Tunaikan Kewajiban Zakat

PRESIDEN Jowo Widodo kembali memberi keteladanan dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Dalam acara Zakat Istana bertajuk Nikmat Berzakat: Tenteramnya Muzaki Bahagiannya Mustahik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3), Presiden menyerahkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI). Setelah Presiden, hal yang sama dilakukan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta Kepala Daerah. Ramadan ini tampaknya merupakan tahun ketiga Presiden dan jajarannya di tingkat pusat memberi keteladanan dalam membayar zakat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, selanjutnya kegiatan yang sama juga dilakukan para gubernur beserta jajarannya di berbagai provinsi. Tentu saja penyerahan zakat melalui Baznas Provinsi masing-masing.

muzakki (orang yang masuk kategori wajib zakat) sebenarnya adalah pimpinan. Perintah iambillah zakat dari sebagian harta mereka.ŕ (Surat At Taubah ayat 103) memang ditujukan kepada pemerintah, waktu itu Nabi Muhammad SAW yang juga sebagai kepala pemerintahan yang kemudian dilanjutkan para Khalifah. Untuk Indonesia meski bukan negara Islam namun mayoritas penduduknya muslim. Kepala pemerintahan, mulai Presiden juga muslim, begitu juga kebanyakan gubernur dan walikota. Karena itu kepala pemerintahan di level manapun, termasuk di instansi-instansi, khususnya yang muslim, sudah sewajarnya kalau mendorong kaum muslim yang dipimpinya untuk membayar zakat.

BEBERAPA tahun belakangan ini, sangat mudah ditemui sampah berserakan di jalan-jalan. Terutama di sekitar jalan lingkar dan pinggiran kota. Berbagai bentuk tulisan dipasang untuk mencegah orang membuang sampah di lokasi yang jelas-jelas bukan tempat sampah. Tulisan larangan yang dipasang mulai yang halus, keras, mengancam bahkan dengan gambar hantu. Tetapi tetap saja, tulisan tidak digubris. Atau pindah membuang sampah ke tempat lain. Sebagian masyarakat kehilangan kesabaran, dengan memasang tulisan yang lebih keras disertai ancaman. Tapi fenomena sampah jalanan tidak berkurang. Pemandangan memalukan ini menukarkan derajat dan wibawa Yogyakarta. Seakan jauh dari peradaban adiluhung.

Tanggungjawab
Siapa mereka sebenarnya? Para pembuang sampah tanpa tanggungjawab, tanpa jiwa dan kotor hati dan perilakunya ini? Tidak diketahui persis. Belum ada surveinya. Tapi bisa dibuat hipotesis. Hipotesis bisa terbukti atau meleset. *Pertama*, adalah mereka yang tidak punya lahan untuk mengelola sampah mandiri di rumah. Atau pemilik kos dan kontrakan yang tidak menyediakan tempat sampah. Ini alasan klasik, umum dan banyak dipakai untuk pembenaran mengotori ciptaan Tuhan.

Bahwa pemerintah tidak hadir menyelesaikan masalah ini, tidak menyediakan tempat sampah secara memadai, nyata benar. Tapi tidak adakah solusi bagi para pemilik lahan terbatas ini? Ada, yaitu mengundang pengelola sampah atau tukang sampah dengan mengeluarkan biaya. Mahal? Relatif. Murka masyarakat, murka korban pemilik lahan yang mereka jadikan buangan sampah, tidak bisa dimintakan maaf. Mereka bisa minta maaf kepada Tuhan. Bagaimana dengan dosa kepada pemilik tanah yang mereka

Muhammad Sayuti



menyelamatkan alam dan mewariskan dunia yang indah bagi anak dan cucu? *Kedua*, mereka adalah orang yang punya lahan, namun banyak alasan untuk tidak mengelolanya dengan bertanggung jawab. Tidak punya waktu. Tidak sempat. Repot! Lalu memilih jalan pintas. *Nrabas*. Kehidupan publik, pemerintahan dan politik adalah cerminan budaya ini. Terstruktur, sistemik dan masif. Korupsi di seluruh sektor. Kebohongan publik di mana-mana. Semua adalah cerminan masyarakatnya. Tidak ada tanggung jawab, bahkan untuk untuk kotoran yang ke luar dari tubuhnya sendiri.

Keseimbangan Ekosistem

Adalah fakta, penduduk DIY tumbuh dengan cepat. Adalah fakta migrasi ke kota marak. Gunung sampah adalah bukti nyata tidak adanya keseimbangan ekosistem. Kalau penduduk bertambah maka tempat sampah ya harus ditambah. Pengembangan perumahan harus diminta bertanggung jawab. Pemerintah yang mengelola pajak masyarakat adalah pengatur kebijakan. Apa konsekuensinya kalau migrasi seperti ini dan perumahan menjamur? Berapa kapasitas pemerintah untuk mengurus penduduknya? Pemerintah tentu harus mau berbagi tanggung jawab. Wakil rakyat yang beberapa waktu lalu dipilih harus menjalankan kewajiban untuk menjaga kesehatan lahir batin konstituenya. Mereka ingin hidup sehat, adil, bersih dan berhati nyaman.

Semua kembali (lagi) ke pendidikan. Nasib. Masyarakat yang sakit menghasilkan wakil rakyat dan abdi negara yang tidak amanah, dusta politik, dan perilaku korup. Karenanya harus lahir generasi baru yang dididik untuk kesatuan ucapan dan perbuatan. Untuk belajar hidup bermartabat, di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Bukan untuk *nrabas* nilai-nilai ujian. Belajar untuk kehidupan yang santun, untuk akhlak mulia, bukan untuk lulus ujian. Sangat berat pekerjaan guru yang hidup di zaman *edan*. Guru harus tetap wasar, mendidik dengan tulus untuk menjaga titipan Tuhan, alam semesta ini. □-d
) *Dr Muhammad Sayuti, Dosen UAD Yogyakarta*

Sampah di Jalanan, Cermin Masyarakat Sakit?

Harga Beras Meningkat, Sejahterakah Petani?

MASALAH tingginya harga beras masih menjadi isu dan perhatian masyarakat termasuk DIY. Mengingat beras merupakan komoditi utama yang dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga harga beras memiliki peran yang sangat penting terjadinya inflasi dalam suatu wilayah. Rilis data BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga beras pada Bulan Februari 2024 mempunyai andil inflasi di DI Yogyakarta (*month to month*) sebesar 0,19% atau sekitar separuh dari total inflasi (*month to month*) Bulan Februari 2024 sebesar 0,39%. Dengan andil inflasi komoditi beras yang tinggi tersebut, bagaimana dengan kondisi kesejahteraan petani padi DIY? mengingat petani padi merupakan penyedia gabah sekaligus sebagai individu yang mengkonsumsi beras.

Indikator
Kenaikan indeks diterima petani padi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan rata-rata harga gabah periode Januari - Februari 2024 sebesar 9,16% dari Rp 7.716,67 menjadi Rp 8.423,81. Di sisi lain, indeks dibayar petani sub kelompok tanaman pangan hanya

Fredy Tjekden

mengalami kenaikan 1,07% dari 123,65 pada Januari 2024 menjadi 124,97 pada Februari 2024. Artinya pendapatan petani padi DIY meningkat lebih dari 5 kali lipat dari pengeluarannya. Ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan terjadi peningkatan kesejahteraan pada petani padi. Namun, data nilai tukar petani tersebut hanya menggambarkan dari sisi kenaikan harga gabah sebagai pemicu naiknya indeks diterima petani padi serta perubahan harga barang konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modal sebagai pemicu naiknya indeks diterima petani. Hal ini belum menggambarkan kondisi produksi riil dari petani padi. Nilai tukar petani akan menjadi indikator kesejahteraan petani padi jika diikuti dengan terjadinya peningkatan produksi padi.

Data Produksi padi di DIY 2023 menunjukkan telah terjadi penurunan produksi padi dibandingkan tahun 2022. Rilis BPS tentang produksi padi menyatakan selama 2023 produksi padi mencapai 534,11 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau menurun sebesar 4,91% (27,59 ribu ton GKG) dibandingkan kondisi selama tahun 2022 yang mencapai 561,70 ribu ton GKG. Fenomena ini menjelaskan bahwa ternyata kenaikan harga gabah yang digambarkan oleh indeks diterima petani padi pada nilai tukar petani tidak dinikmati petani padi.
Membantu Petani
Karena kenaikan harga gabah

tersebut tidak diikuti dengan terjadinya peningkatan produksi padi. Kenaikan harga gabah tersebut malah dipicu terjadinya penurunan produksi padi. Situasi penurunan produksi padi tersebut mengindikasikan, meningkatnya harga gabah tidak diikuti meningkatnya kesejahteraan petani padi. Kondisi ini tentunya tidak bisa dibiarkan secara terus menerus mengingat sebagian besar penyumbang kemiskinan tertinggi itu adalah petani. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah harus bertindak cepat dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Caranya, dengan membantu petani padi meningkatkan produksinya. Serta menurunkan harga kebutuhan konsumsi serta penurunan biaya produksi pertanian padinya. Jika hal ini berhasil kesejahteraan petani meningkat dan angka kemiskinan akan menurun. □-d
) *Fredy Tjekden SST MSi, Statistisi BPS Kabupaten Kulonprogo*

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pojok KR
Kapolda siapantisipasi kejahatan jalanan.
-- Para penjahat jalanan jangan coba-coba.

Cegah antraks, tingkatkan edukasi.
-- Jangan sampai antraks menyebar.

Kampus kembali menggugat.
-- Jangan dianggap angin lalu.
Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55233. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Banjir Semarang, Pelajaran Bagi Kota Lain?
MENDENGAR dan melihat tayangan banjir dan longsor Semarang, rasanya miris. Ibukota Jawa Tengah yang diguyur hujan deras sejak Rabu siang hingga malam, telah mengakibatkan banjir dimana-mana. Viral di medsos Stasiun Tawang, yang bisa dikatakan terendam, Juga Banjir Kanal Timur meluap. Konon 10 titik masih tergenang antara 15-80 cm. Semarang banjir orang mengatakan biasa, bahkan ada lagunya. *Semarang kaline banjir,*
ja sumelang ra dipikir OO . Tetapi apakah ini tidak bisa menjadi pelajaran bagi kota lain dalam menata dan merencanakan kota? Bagaimana agar kondisi ini tidak melanda daerah lain. Saya khawatir membangun kota tanpa memperhatikan drainase, kawasan hijau, resapan dan lainnya, semua kota akan bermasalah dengan banjir. Ini tidak bisa dianggap remeh, sepele. □-d
) *Ir Agung, Banyumanik Semarang*

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktor Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktor Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Rahrja.
Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP